

Pengeluaran Negara dan Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Siti Baitir Rohimah

Universitas Islam Malang, sitibaitirr@gmail.com

ABSTRAK

Pengeluaran negara adalah instrumen penting kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, studi tentang efektivitas kualitas anggaran negara terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia masih belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis data APBN, laporan pemerintah, serta penelitian sebelumnya untuk periode 2020–2024. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pengeluaran negara di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkontribusi pada perbaikan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, efektivitasnya terhambat oleh ketidakefisienan anggaran dan pengawasan program yang lemah. Studi ini menekankan bahwa optimalisasi pengeluaran negara tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran tetapi juga pada kualitas tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Pengeluaran Negara, Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Efektivitas Anggaran.*

PENDAHULUAN

Pengeluaran negara merupakan alat utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional (Mankiw, 2021; Suparmoko, 2020). Pengeluaran negara tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pembiayaan pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk intervensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya publik yang efektif, efisien, dan adil, dalam perspektif administrasi publik (Bastian, 2019). Melalui kebijakan belanja negara, pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan prioritas pembangunan, memperkuat layanan sosial, dan mengurangi disparitas ekonomi antar daerah (Mardiasmo, 2021).

Secara normatif, pengaturan pengelolaan belanja negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa belanja negara digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2003). Dalam praktiknya, pelaksanaan pengeluaran negara terwujud dalam pengeluaran pemerintah pusat, transfer ke daerah, subsidi, belanja modal, dan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengeluaran pemerintah adalah indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah. Beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi Indonesia dan ekonomi global, pemerintah terus meningkatkan kapasitas belanja negara. Realisasi belanja negara tahun 2024 tercatat Rp3.090 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat Rp2.392 triliun dan transfer ke daerah Rp698 triliun. Data ini berasal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ukuran alokasi tersebut menunjukkan komitmen kuat dari negara untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, peningkatan jumlah anggaran tidak sepenuhnya sebanding dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih ada berbagai masalah dalam pelaksanaan belanja negara seperti ketidakakuratan target program, ketidakefisienan penggunaan anggaran, kualitas pengawasan yang rendah, dan ketidaksetaraan distribusi fiskal antar daerah. Selain itu, praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas birokrasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas belanja publik (Andriana, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama pengeluaran nasional tidak hanya terletak pada ukuran anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks administrasi publik, tata kelola pengeluaran negara yang tidak optimal dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan masyarakat (Tahar & Prayoga, 2021; Wanusmawatie et al., 2024; Wibisono et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prasetyia (2020) menjelaskan bahwa belanja daerah berfungsi dalam pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan sektor infrastruktur dan pendidikan. Menurut Jematu (2016), belanja pemerintah memiliki hubungan positif dengan peningkatan kesejahteraan sosial jika dikelola secara produktif dan terarah. Sementara itu, Lailani (2023) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Namun, sebagian besar studi sebelumnya membahas dampak ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Studi tentang pengeluaran pemerintah sebagai instrumen fiskal dalam perspektif administrasi publik dan tata kelola kesejahteraan sosial masih relatif terbatas. Penelitian ini berfokus pada analisis pengeluaran negara sebagai instrumen fiskal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan administrasi publik. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai fungsi pengeluaran negara, efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal dan tantangan tata kelola anggaran publik di Indonesia. Pembatasan ini diharapkan dapat membuat penelitian lebih terarah dan mampu menghasilkan analisis mendalam tentang hubungan antara kebijakan pengeluaran negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana fungsi pengeluaran pemerintah sebagai instrumen fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) bagaimana efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendukung pembangunan dan layanan publik; dan (3) apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola pengeluaran pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pengeluaran negara dalam perspektif kebijakan fiskal, untuk menganalisis efektivitas pengeluaran negara terhadap kesejahteraan masyarakat, dan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan tata kelola fiskal dalam pelaksanaan pengeluaran negara di Indonesia. Keberhasilan penelitian ini adalah upaya untuk mengintegrasikan perspektif administrasi publik dengan studi kebijakan fiskal dalam analisis pengeluaran negara sebagai instrumen kesejahteraan publik. Penelitian ini tidak hanya meneliti pengeluaran negara sebagai variabel ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola publik yang terkait dengan efektivitas birokrasi, akuntabilitas pemerintah, dan kualitas layanan publik. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi administrasi publik, terutama pada pengelolaan keuangan negara dan kebijakan kesejahteraan sosial (Fatihudin, 2012; Prakasa & Indrarini, 2023; Robimadin & Cahyono, 2020; Sakti & Fahrullah, 2022; Yulian & Isbandono, 2024).

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik untuk meneliti pengeluaran negara sebagai instrumen fiskal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Unit analisis dari penelitian ini adalah kebijakan belanja negara, khususnya pada belanja publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial di Indonesia. Data Penelitian Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi, termasuk jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, data Badan

Pusat Statistik, serta peraturan terkait keuangan negara. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara bertahap, yaitu reduksi data, pengelompokan tematik, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan efektivitas pengeluaran negara dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, data dikelompokkan menurut tema seperti fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal. Data yang dikelompokkan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memudahkan interpretasi hubungan kebijakan fiskal dan kesejahteraan publik. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan resmi pemerintah untuk memperoleh analisis yang objektif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengeluaran Negara dan Kesejahteraan Sosial

Pengeluaran negara adalah instrumen fiskal yang mempunyai fungsi strategis untuk menciptakan stabilitas ekonomi, memperluas pelayanan publik dan memperkuat kesejahteraan sosial. Pengeluaran negara dalam administrasi publik tidak hanya dilihat sebagai aktivitas administratif pengeluaran anggaran, tetapi juga sebagai instrumen intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempromosikan pembangunan pemerataan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran negara sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola fiskal, orientasi pengeluaran, dan kapasitas lembaga pemerintah dalam mengelola program pembangunan.

Pada tahun 2024, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, belanja negara mencapai Rp3.090 triliun, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Namun demikian, besarnya alokasi anggaran belum sepenuhnya proporsional dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya ketimpangan antarwilayah, rendahnya efektivitas sebagian program bantuan sosial, dan tidak sesuai antara target pembangunan dan capaian program di lapangan. Secara empiris, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut penelitian Ferry Prasetyia (2020), pengeluaran publik lokal di Jawa Timur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan layanan pendidikan. Namun, studi tersebut juga mencatat bahwa dampak positif dari pengeluaran daerah cenderung melemah ketika pengelolaan anggaran tidak disertai dengan pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja.

Temuan serupa diungkapkan oleh Jematu (2016) yang menjelaskan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian dan industri pengolahan. Namun, dalam penelitian ini, terdapat ketidakseimbangan dalam manfaat pembangunan antar daerah akibat distribusi fiskal yang tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Menurut perspektif administrasi publik, fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan anggaran di Indonesia masih cenderung berfokus pada penyerapan anggaran, daripada pencapaian hasil pembangunan. Akibatnya, keberhasilan program biasanya didefinisikan dalam hal realisasi anggaran yang tinggi, daripada dalam hal perubahan sosial. Kondisi ini adalah salah satu penyebab rendahnya efektivitas pengeluaran publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dinamika Pengelolaan Pengeluaran Negara di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima masalah utama yang mempengaruhi efektivitas belanja negara di Indonesia, yaitu: korupsi anggaran, ketidakefisienan program, disparitas fiskal antar daerah, kapasitas aparatur yang rendah, dan transparansi publik yang lemah.

Tabel 1. Permasalahan Pengeluaran Negara dan Dampaknya

No	Permasalahan	Temuan Empiris	Dampak terhadap Kesejahteraan
1	Korupsi anggaran	Penyalahgunaan dana proyek dan bansos masih tinggi pada level daerah	Menurunkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat
2	Inefisiensi program	Terdapat program tumpang tindih antar kementerian/lembaga	Anggaran tidak efektif dan output pembangunan rendah
3	Ketimpangan fiskal	Kapasitas PAD daerah tidak merata	Pelayanan publik antarwilayah menjadi timpang
4	Kapasitas aparatur rendah	Penyusunan indikator kinerja belum optimal	Program tidak tepat sasaran dan sulit dievaluasi
5	Transparansi lemah	Informasi anggaran belum sepenuhnya terbuka	Partisipasi dan pengawasan masyarakat rendah

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti)

Masalah pertama adalah bahwa korupsi dan penyalahgunaan dana publik masih meluas. Korupsi dalam pengeluaran pemerintah tidak hanya mengakibatkan kerugian fiskal tetapi juga menghambat distribusi manfaat pembangunan kepada masyarakat. Laporan KPK 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus korupsi di daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta manipulasi proyek pembangunan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara belum mampu secara penuh menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Secara teori, kondisi ini dapat dijelaskan dengan menerapkan pendekatan teori prinsipal-agen, di mana pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki lebih banyak informasi dan wewenang daripada masyarakat sebagai penerima manfaat. Penundaan informasi memberikan peluang munculnya *moral hazard* dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, digitalisasi manajemen anggaran melalui *e-budgeting* dan *e-audit* adalah kebutuhan penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Masalah kedua adalah ketidakefisienan program-program pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa program pembangunan masih bersifat administratif dan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Faktanya, beberapa kementerian dan pemerintah daerah memiliki program serupa tanpa koordinasi yang tepat, yang mengakibatkan pemborosan anggaran. Kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi kebijakan publik dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, orientasi belanja pemerintah yang masih berfokus pada belanja rutin menyisakan ruang fiskal yang terbatas untuk pembangunan produktif. "Namun, belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat." Oleh karena itu, pengeluaran negara harus diarahkan pada program-program yang mampu memberikan dampak sosial-ekonomi jangka panjang.

Ketiga, ketimpangan fiskal antar daerah. Namun, kapasitas keuangan daerah masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar meskipun setelah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Wilayah dengan basis ekonomi yang kuat memiliki kemampuan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Akibatnya, kualitas pelayanan publik antar daerah menjadi tidak seimbang. Dari perspektif fiskal federalisme, transfer

fiskal dari pemerintah pusat seharusnya dapat mengurangi ketimpangan pembangunan. Namun, dalam praktiknya mekanisme transfer dana tidak memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata daerah. Akibatnya sebagian wilayah masih bergantung dengan dana transfer pusat tanpa mampu membangun kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Selanjutnya permasalahan adalah rendahnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Masih banyak perangkat daerah yang kesulitan dalam menyusun indikator program yang terukur dan relevan dengan target pembangunan. Selain itu, reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal juga berimbas pada kualitas pengelolaan pengeluaran negara. Rotasi jabatan tanpa memperhatikan kompetensi teknis akan mengakibatkan lemahnya konsistensi pelaksanaan program. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, peningkatan integritas dan pengenalan sistem merit merupakan hal penting dalam reformasi tata kelola fiskal. Masalah terakhir adalah kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penganggaran. Pemerintah telah menyediakan berbagai platform pengungkapan informasi, tetapi akses publik terhadap data anggaran tetap terbatas dan secara substansial sulit dipahami. Pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran belum berjalan secara optimal sebagai akibatnya.

Dalam paradigma *new public governance*, pengelolaan anggaran publik harus melalui partisipasi publik sebagai bentuk tata kelola kolaboratif. Partisipasi publik penting tidak hanya sebagai kontrol sosial tetapi juga untuk memastikan bahwa program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran Negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen demokratis dalam pengembangan kesejahteraan.

Strategi Penguatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Berdasarkan hasil studi ini, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah. Pertama, memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui integrasi *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-audit* untuk meminimalkan penyimpangan anggaran. Kedua, menerapkan penganggaran berbasis *outcome* agar program pemerintah menjadi lebih terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan teknis dan reformasi birokrasi berdasarkan sistem merit. Kedua, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran publik. Dengan langkah tersebut, pengeluaran negara dapat difokuskan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan dan penguatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara adalah instrumen fiskal yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. "Efektif tidaknya anggaran bukan hanya dari besaran anggaran, tetapi juga dari tata kelola yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan." Telah terbukti bahwa pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkontribusi pada peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi ketika dikelola dengan baik, efisien, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan pengeluaran negara di Indonesia masih menghadapi masalah seperti ketidakseimbangan distribusi fiskal antar daerah, rendahnya efektivitas pengeluaran publik, dan pengawasan yang lemah yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat lebih dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan publik daripada besarnya pengeluaran negara itu sendiri. Oleh karena itu, reformasi pengeluaran negara harus berbasis kinerja dan hasil. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai lebih merata. Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi melalui digitalisasi anggaran, memperluas evaluasi berbasis manfaat, dan memperbaiki pemerataan transfer fiskal dan kapasitas pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, G. (2021). Penerapan e-procurement pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap identifikasi persekongkolan tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–381. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381>
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (3rd ed.). Erlangga.
- Fatihudin, D. (2012). Kontribusi private investment dan belanja modal pemerintah terhadap nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota high economic di Provinsi Jawa Timur. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.26740/jaj.v4n1.p90-104>
- Jematu, M. M. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 89–101.
- Lailani, E. O. (2023). Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan pertanian di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(1), 33–47.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Publisher.
- Prakasa, N. A., & Indrarini, R. (2023). Peran pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 114–123. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n2.p114-123>
- Robimadin, C. N., & Cahyono, H. (2020). Kebermanfaatan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq lembaga manajemen infaq kantor Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 128–138. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p128-138>
- Sakti, L. I. E., & Fahrullah, A. (2022). Pengelolaan ZIS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi pada Baznas Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 106–119. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p106-119>
- Suparmoko. (2020). *Ekonomi publik untuk keuangan negara dan pembangunan*. BPFE.
- Tahar, A., & Prayoga, M. A. (2021). Pengaruh tata kelola publik, intergovernmental revenue, dan kompetensi terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(2). <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p>
- Wanusmawatie, I., Durrety, S. F., Ferdhianzah, H. J., & Khasanah, U. R. (2024). Strategic analysis of village government performance in governance: Study in Kalirejo Village, Probolinggo Regency, Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v9n1.p1-11>
- Wibisono, N., Asnawi, N., & Ekowati, V. M. (2024). Improving village government performance through village financial management, good village governance, and knowledge management. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 164–177. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p164-177>
- Yulian, M. W., & Isbandono, P. (2024). Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik lokal. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 2(3).